


PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI DISTRIK SORONG UTARA KOTA SORONG (Studi Pada Pedagang Lokal Mama-mama Papua Di Depan Jupiter Super Market)

¹Muhammad Arifin Abd Kadir, ²Muhammad Ali, ³Ummu Salmah

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorong

Article Info <i>Article history:</i> Accepted: 21 Agustus 2022 Publish: 24 August 2022	ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kebijakan Pemerintah terhadap Pedagang Lokal Mama-Mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi adalah penelitian lapangan. Hasil dalam penelitian ini yaitu 1. Pedagang Lokal merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di kembangkan, karena pedagang lokal terutama mama-mama papua yang berjualan sekarang bersaing dengan pedagang atau retail modern. 2. Dalam pengembangan pedagang lokal ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pedagang-pedagang lokal terutama mama-mama papua. Saran yaitu Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong masih perlu dan harus ditingkatkan yaitu dengan mengadakan sosialisai atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian pedagang lokal dalam berdagang serta bantuan dalam pemodal dan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang
Article Info <i>Article history:</i> Accepted: 21 Agustus 2022 Publish: 24 August 2022	Abstract This study aims to examine the Government's Policy towards Local Traders of Papuan Mamas in North Sorong District, Sorong City. This study uses a qualitative approach. Qualitative research is research on descriptive research and tends to use analysis. Process and meaning (subject perspective) are more highlighted in qualitative research. The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is in accordance with the facts on the ground. The type of research carried out in the thesis is field research. The results in this study are 1. Local traders are a big responsibility for the government to be developed, because local traders, especially Papuan mamas who sell now compete with modern traders or retailers. 2. The development of local traders requires a clear and precise strategy from the government itself in order to be able to answer any problems that exist in the development of local traders, especially Papuan mamas. Suggestions, namely the role of the government in improving the economy of local communities in North Sorong District, Sorong City still needs and must be improved, namely by holding socialization or training to improve the expertise of local traders in trading as well as assistance in capital and facilities that support trading activities
Corresponding Author: Muhammad Arifin Abd Kadir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong E-mail: alifarifin1986@gmail.com	<p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada upaya dan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan didalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha besar, menengah, kecil, dan koperasi diantaranya adalah melalui pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dualisme kota dan desa telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal yang positif dalam perekonomian, tetapi juga negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun sebagian lainnya tanpa bekal ketrampilan yang

dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya (Harsiwi, 2002). Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu.

Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan “ekonomi bawah tanah” (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1978 dalam Suryanto 2010). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas, seperti halnya yang terjadi di Kota Sorong dimana pelaku usaha kecil banyak terlihat melakukan usaha di pinggir jalan.

Distrik Sorong Utara, yang mempunyai pusat pemerintahan di Kota Sorong, sudah barang tentu akan terdapat banyak pelaku ekonomi mulai dari usaha besar (industri/perdagangan), usaha menengah, dan usaha kecil seperti industri rumah tangga maupun Pedagang Kali Lima (PKL) Lokal seperti di Kota Sorong biasa di sebut pedagang lokal Mama-mama Papua. Pedagang kaki lima adalah suatu jenis kegiatan yang sifatnya informal tetapi ada dan berkegiatan di masyarakat dimana mereka adalah pelaku usaha yang melakukan proses perdagangan barang ataupun jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap (Rafidah, 2019). Dari berbagai pelaku ekonomi itulah yang kemudian akan membentuk dan menghiasi wajah pusat pemerintahan kabupaten atau kota menjadi maju, berkembang dengan keindahan dan kerapian yang tertata dengan baik atau bahkan mungkin yang terjadi adalah sebaliknya kumuh dan semrawut.

Pedagang Lokal Mama-mama Papua adalah salah satu usaha skala mikro dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang lokal Mama Papua adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha-usaha tersebut dilaksanakan pada suatu tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima lokal pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja dengan modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, akan tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau supplier yang memasio barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti cuma sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Dengan demikian kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Mereka yang masuk dalam kategori Pedagang Lokal Mama Papua ini mayoritas berada dalam tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal dan sudah berumur, Bidang informal berupa Pedagang kecil menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup.

Kegiatan ekonomi pedagang mama-mama asli Papua di ruang pasar menghadapi persaingan yang cukup tajam. Posisi kegiatan antara pedagang mama-mama asli Papua dengan pedagang pendatang mempunyai peluang dan kesempatan yang berbeda. Pedagang pendatang lebih berpeluang dan menguasai sebagian besar aset pasar baik secara fasilitas maupun posisi ruang pasar yang dianggap berpotensi untuk pengembangan kegiatan jual beli. Sementara pedagang mama-mama asli Papua (pribumi) mempunyai peluang sangat sedikit terhadap fasilitas pasar yang layak dan memadai untuk pengembangan ekonomi atau kegiatan jual belinya. Pedagang mama-mama asli Papua (pribumi) merasa kurang diuntungkan, sehingga dalam aktivitas dagangnya mereka tidak mampu bersaing. Lokasi Pedagang lokal terkhusus Mama Papua juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis

besar kesulitan yang dihadapi Pedagang Mama Papua berkisar antara Kebijakan pemerintah yang masih kurang adalah permodalan, Dibutuhkan sistem perbankan yang lebih sederhana agar pedagang pribumi (mama-mama asli Papua) lebih mudah mengakses pinjaman modal usaha, sehingga usahanya cepat berkembang dan peningkatan pendapatan dapat tercapai secara maksimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi adalah penelitian lapangan, bertujuan untuk melihat Kebijakan Pemerintah terhadap Pedagang Lokal Mama-Mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong.

Menurut Sugiyono, (2009: 80) Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Untuk populasi penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perdagangan Kota Sorong, Pegawai Distrik Sorong Utara dan Pedagang Lokal Mama Papua di Jupiter Super Market, Distrik Sorong Utara. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, verifikasi, dan triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota sorong merupakan kota perindustrian dan kota perekonomian terbesar di wilayah Papua Barat. Pada awalnya berdirinya, Sorong di sebut sebagai kota administratif kemudian perlahan berkembang menjadi kota/kabupaten yang disebut sekarang Kota Sorong. Dinas Perdagangan kota sorong di bentuk pada tahun 2000 setelah Walikota depenitif pak Yumame menjabat, kemudian dinas tersebut masih gabung dan disebut Dinas Pemberdayaan dan Perdagangan kota sorong, lalu kemudian pada tahun 2004 terjadi perubahan dan dipisahkan antara Dinas Pemberdayaan dan Dinas Perdagangan hingga saat ini, dimana memiliki tugas memberi perhatian terhadap sektor usaha, unit usaha, potensi usaha, kemajuan ekonomi dan usaha, pelaku usaha, dan lain sebagainya yang mencakup proses perdagangan barang dan jasa di Kota Sorong.

Potensi pada sektor ekonomi yang cukup menonjol selain minyak, kelapa sawit, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah industri rumah tangga serta perdagangan pada skala kecil yang lebih dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) atau di Papua sering disebut pedagang Mama-mama Papua yang hanya menjual pinang dan sayur dipinggir jalan oleh karena modal usaha yang kurang. Modal merupakan factor yang sangat kuat dengan usaha yang didirikan dan kemajuan dari usaha tersebut. Modal juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan dari Pedagang Kaki Lima (Mama-mama Papua).

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan dari pedangang kaki lima yakni modal, lama usaha, tingkat pendidikan, serta lokasi usahanya. Hal ini sejalan dengan Fatmawati (2014) yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima, yaitu: 1) modal, modal merupakan factor yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang telah didirikan; 2) lama kerja, lama kerja yang digunakan seseorang makan akan tinggi tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut, dan sebaliknya jika semakin sedikit jumlah jam kerja yang digunakan seseorang maka semakin sedikit pula tingkat upah oleh seseorang tersebut; dan 3) pengalaman, salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, keberhasilan pedagang kaki lima itu dapat diukur dari pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini pengalaman diukur berdasarkan lama seorang pedagang tersebut melakukan usaha. Tingkat pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima *Mama-Mama Papua* tergantung pada waktu-waktu tertentu. Pada hari-

hari kerja pendapatan yang mereka dapatnya banyak dan seringkali jualan mereka habis, akan tetapi pada hari libur (sabtu-minggu) tingkat pendapatan mereka biasa saja.

Dalam menggelar dagangannya setiap Pedagang Kaki Lima diwajibkan untuk senantiasa 1) memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keasrian, dan kesehatan lingkungan dilokasi atau tempat usahanya, 2) menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran atau kebenaran dan kepribadian bangsa, 3) tidak menggunakan dan tidak memfasilitasi jual beli barang atau bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum dan agama. Selain itu ada beberapa Larangan Pedagang Kaki Lima diantaranya: 1) membangun atau mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi – permanen; 2) melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah; 3) menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan; 4) menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktifitas kerumah tanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha; 5) menggunakan badan jalan atau menempatkan peralatan atau barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu; 6) membiarkan peralatan atau komponen, rangka dan tenda tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan; 7) menjual minuman beralkohol atau barang atau bahan terlarang lainnya, melakukan aktivitas yang mengganggu atau melanggar norma agama, etika dan kesusilaan (Rusdi et al., 2021).



Gambar 1. Aktifitas Mama-Mama Papua menjual Pinang dan Sayuran.

a. Peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong

Pertanyaan diatas ditujukan kepada satu informan yakni Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong, yakni DEONESIA BERUAT WARIN, S. Sos, diketahui rincian hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sudah merasa bekerja sesuai dengan aturan, sudah melakukan banyak kegiatan baik pengembangan SDM, pelatihan dan pengadaan lapak yang lebih modern tapi yang perlu diketahui mengubah SDM Papua kearah lebih baik bukanlah hal yang mudah, butuh kerjasama ke semua pihak agar program kami berjalan berkesinambungan”.

Pendapat informan diatas, pada dasarnya telah dipaparkan secara jelas Peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dimana informan menyatakan bahwa, kalau kita mengukur kinerja Pemerintah Kota Sorong, kami sudah melaksanakan banyak kegiatan tapi diperlukan peran berbagai pihak untuk program berjalan secara kesinambungan. Abd Kadir *et. al.* (2022) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik

untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan pokok setiap warga negara atau penduduk/warga masyarakat atas suatu barang dan jasa maupun pelayanan administrasi terkait kepentingan publik yang sesuai dengan hak-hak dasarnya.

Selanjutnya Pertanyaan yang ada diatas ditujukan kepada satu informan yakni DORCE selaku pedagang lokal mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan pasar tradisional masih di anggap kurang peduli, buktinya saja masih ada permasalahan yang di dapati pada pasar tradisional ini”

Pendapat informan diatas, pada dasarnya telah dipaparkan secara jelas bahwa peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dimana informan menyatakan bahwa, masih minimnya pembangunan dan pengembangan pasar tradisional. Upaya pemberdayaan pedagang lokal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pedagang lokal dalam rangka meningkatkan usahanya. Hal ini sejalan dengan Soerjono (2001), yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Dalam penyelenggaraan pemerintah diperlukan perannya dalam menunjang kemajuan masyarakat setempat agar aktualisasi dari kerja nyata intitusi pemerintahan yang terselenggara dengan baik.

Berikut hasil wawancara menurut Ibu Irene Dolly Selaku Sekretaris Kegiatan bimbingan teknis mengatakan bahwa :

“Pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada pedagang lokal telah membawa manfaat bagi pedagang lokal khususnya mama-mama papua, meskipun kegiatan pengembangan SDM tidak dapat diberikan rutin pada setiap tahunnya karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta hasilnya yang masih dirasa kurang maksimal bagi pedagang lokal karena waktu pelaksanaan hanya sebentar namun dengan adanya kegiatan pengembangan SDM telah diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Sorong dapat membantu pedagang lokal dalam mengembangkan usaha mereka”.

Pendapat informan tersebut, pada dasarnya telah dipaparkan secara jelas bahwa ada upaya pemberdayaan pedagang lokal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) sendiri yang sudah berusaha memberikan perhatian dalam bentuk diadakannya kegiatan pelatihan dan sisoalisai yang diharapkan dapat membantu pedagang lokal dalam mengembangkan usahanya. Ini adalah salah satu peran Pimpinan kami untuk bagaimana meningkatkan pengembangan SDM di tanah Papua. Hal ini sesuai dengan Kadir (2017) yang menyatakan bahwa Kepemimpinan berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing.

Padahal dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan PKL, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan, promosi

usaha dan event pada lokasi binaan, dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman (Yuliana *et. al*, 2017).

b. Faktor-faktor yang menghambat Peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong

Pemerintah harusnya turut andil dalam kemajuan pedagang lokal atau Mama-mama Papua, selain karena mereka adalah pribumi yang menjadi pelaku usaha, harusnya dibina dan diatur dengan sebaik-baiknya karena Pedagang kaki lima ini selain melakukan usaha perdagangan akan tetapi lokasi usahanya berada pada fasilitas publik (trotoar jalan) yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki, selain itu aktifitas perdagangan yang dilakukan dapat membuat kemacetan sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam menata dan membina pedagang kaki lima. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah.

Menurut Yeti Yakomina (48 Tahun) selaku pemerhati PKL Mama-mama Papua dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya adalah:

1. *Ketersediaan sarana dan prasarana*

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.

2. *Ketersediaan anggaran*

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai coordinator seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

3. *Kemitraan*

Prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan value for money, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik (good governance).

4. *Partisipasi dari masyarakat*

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut

Kemudian informan selanjutnya, Bapak Jekson Mayo (45 Tahun) selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Persaingan akan memberikan sisi positif dan negatif bagi para pedagang. Sisi positif yang secara tidak langsung dirakan oleh pedagang mama-mama asli papua adalah

motivasi untuk mempertahankan dan melakukan kegiatan ekonom di pasar. Sisi positif yang lain adalah, pedagang mama-mama papua memiliki kemampuan menarik pembeli dengan cara menurunkan harga barang, membeli dalam jumlah banyak diberikan potongan harga, melayani pembeli dengan baik dan sabar, dan memberikan bonus tambahan pada pembelian tertentu. Sisi negatif yang terjadi adalah, munculnya kecemburuan antara pedagang pribumi dengan pedagang pendatang dalam hal fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini dapat memicu konflik karena penguasaan sumber ekonomi sepihak, sehingga masing-masing pihak menggunakan caranya untuk merebut peluang-peluang ekonomi yang ada. Siapa yang kuat, baik secara modal dan strategi maka dialah yang beruntung, begitupun pun sebaliknya. Pada bagian ii mama-mama papua tentu mengalami kesulitan, karena kegiatan jual beli mereka tidak ditunjang dengan keahlian berdagang”. Baliau juga menambahkan “Sisi negatif yang lain adalah, sebagian besar pedagang mama mama asli Papua memiliki pemikiran bahwa jenis barang dagangan yang dijual masih dimanjakan oleh alam. Jenis barang dagangan itu dapat diperoleh dari hasil kebun sendiri atau membeli dari orang lain sehingga mereka hanya berpikir untuk laris terjual saja. Di sisi lain pedagang mama-mama asli Papua merasa bahwa sebagai orang asli Papua (pribumi), tentu tidak begitu sulit untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi yang dilakukan lebih berorientasi pada desakan kebutuhan hidup keluarga saja, bukan untuk pengembangan kegiatan ekonomi di pasar”.

Dari hasil wawancara di atas Penulis menyimpulkan bahwasannya hambatan Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong adalah munculnya kecemburuan antara pedagang pribumi dengan pedagang pendatang dalam hal fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini dapat memicu konflik karena penguasaan sumber ekonomi sepihak, sehingga masing-masing pihak menggunakan caranya untuk merebut peluang-peluang ekonomi yang ada. Siapa yang kuat, baik secara modal dan strategi maka dialah yang beruntung, begitupun pun sebaliknya. Pada bagian ini mama-mama papua tentu mengalami kesulitan, karena kegiatan jual beli mereka tidak ditunjang dengan keahlian berdagang ditambah lagi keberadaan pedagang kaki lima semakin bertambah. Maraknya pedagang kaki lima juga akan menjadikan masalah yang lebih besar akan penggunaan fasilitas umum sehingga diperlukan turun tangan yang lebih sigap dan tepat oleh pemerintah. Menurut Rafidah (2019), keberadaan pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan menjamur hingga ke trotoar atau pusat perkotaan, menjadikan keberadaan pedagang kaki lima menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah karena dianggap memicu kemacetan bagi pengendara, terganggunya akses pejalan kaki dan terganggunya keindahan kota.

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kota Sorong sebagai dinamisor berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong masih perlu dan harus ditingkatkan yaitu dengan mengadakan sosialisai atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian pedagang lokal dalam berdagang serta bantuan dalam pemodal dan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang dan; 2) Faktor-faktor yang menghambat Peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-

mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong adalah kurangnya fasilitas yang diberikan, mama-mama papua mengalami kesulitan karena kegiatan jual beli mereka tidak ditunjang dengan keahlian berdagang dan sebagian besar pedagang mama mama asli Papua memiliki pemikiran bahwa jenis barang dagangan yang dijual masih dimanjakan oleh alam. Jenis barang dagangan itu dapat diperoleh dari hasil kebun sendiri atau membeli dari orang lain sehingga mereka hanya berpikir untuk laris terjual saja.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Mama–Mama Papua yang memberikan waktunya untuk mau di wawancarai dan semua pihak yang membantu penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kadir, M. A., & Purnomo, A. (2022). Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Distrik Maladum Mes Kota Sorong. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 59-68.
- Fatmawati, Yolamalinda, Rizky Natassia. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Hlm 1-9.
- Harsiwi. (2004). *Konflik Kerja-Keluarga Dan Kepuasan Kerja Akademisi Wanita*. *Jurnal EKOBIS*, 3(1): 217-229.
- Kadir, M. A. A. (2017). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 37-47.
- Rafidah, R. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 55-69.
- Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L. (2021). Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 10-24.
- Soerjono Soekanto. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi* (ed.5). CV. Alfabeta: Bandung.
- Suryanto. 2010. *Sebuah Upaya Perbaikan dan Inovasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik*. Media Kekayaan Negara Ed 1: Jakarta.
- Yuliana, B., Suaib, H., & Purnomo, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan. *Gradual*, 6(1), 81-93.